



## MEMBENTUK KARAKTER BANGSA PADA MASYARAKAT MULTIKULTURAL MALUKU UTARA

Wahyudin Noe<sup>1</sup>, Sitirahia Hi. Umar<sup>2</sup>

<sup>1,2</sup> Program Studi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan FKIP Universitas Khairun

Email: <sup>1</sup>wahyudinnoe@unkhair.ac.id; <sup>2</sup>sitirahia@gmail.com

Diterima : 09-01-2020

Direvisi : 10-03-2020

Dipublikasi : 04-04-2020

**Abstrak.** Fenomena permasalahan bangsa hingga kini tak kunjung selesai dari berbagai peristiwa konflik yang berbau suku, agama, dan ras (SARA) karena kuatnya sikap intoleransi dan egoisme sektoral. Isu ini penting untuk diangkat, mengingat kondisi kehidupan masyarakat Maluku Utara dengan tingkat keberagaman budaya (multicultural) yang tinggi, baik keberagaman bahasa, suku, etnik, maupun agama sebagai contoh dalam berkehidupan yang baik. Meskipun terlihat beragam, namun aktifitas kehidupan masyarakat sehari-hari terlihat aman dan damai. Tentu keberagaman dipandang sebagai realitas sosial bagi masyarakat untuk saling mengenal, saling menghargai dan menghormati, serta membangun persaudaraan yang lebih baik tanpa melihat latar belakang sosial yang berbeda-beda. Kondisi kehidupan demikian harus dijaga secara bersama-sama oleh semua komponen bangsa antara lain: pemerintah, tokoh masyarakat (tokoh agama, tokoh etnik, tokoh pemuda, akademisi) beserta orang tua. Perlunya sikap antisipatif yang tinggi untuk mencegah dari berbagai potensi terjadinya konflik sosial. Oleh karena itu, bentuk antisipatif tersebut dilakukan dengan cara menguatkan peran dari tiga sektor lingkungan pendidikan yaitu: (1) pendidikan formal (di sekolah dan perguruan tinggi); (2) pendidikan non-formal (di masyarakat); dan (3) pendidikan informal (di keluarga dan lingkungan) untuk membentuk nilai-nilai karakter bangsa seperti nilai toleransi, nilai demokratis, dan nilai gotong-royong pada masyarakat multikultural. Adapun pembentukan nilai karakter bangsa pada pendidikan formal dapat diselenggarakan melalui proses pembelajaran karakter pada semua mata pelajaran dan proses pembiasaan (habituasi) di dalam pergaulan peserta didik di sekolah/perguruan tinggi. Sementara pembentukan karakter bangsa pada pendidikan non-formal dapat melalui kegiatan-kegiatan kemasyarakatan yang diselenggarakan oleh masyarakat dan pemerintah seperti, workshop (pelatihan), penataran dan sosialisasi, dimana kegiatan kemasyarakatan tersebut dapat memberikan pemahaman dan membangun kesadaran masyarakat untuk mengenal lebih jauh pentingnya nilai-nilai karakter bangsa. Sedangkan pembentukan karakter bangsa pada pendidikan informal bisa melalui pembinaan dan keteladanan dari orang tua dan tokoh masyarakat. Ketiga jalur lingkungan pendidikan tersebut, memiliki peran penting untuk membentuk karakter bangsa sehingga dapat membangun kehidupan masyarakat multikultural yang damai, rukun, dan harmonis.

**Kata Kunci:** habituasi, karakter, multikultural, maluku utara, gotong royong

**Abstract.** The phenomenon of the nation's problems until now has not been resolved from various conflict events that smelled of ethnicity, religion, and race (SARA) because of the strong attitude of intolerance and sectoral egoism. This issue is important to be raised, bearing in mind the living conditions of the people of North Maluku with a high level of cultural diversity (multicultural), both the diversity of languages, ethnicities, ethnicities, and religions as examples in good living. Although it looks diverse, the activities of daily community life look safe and peaceful. Of course, diversity is seen as a social reality for people to know each other, respect and respect each other, and build better brotherhood without looking at different social backgrounds. Such living conditions must be jointly guarded by all components of the nation including government, community leaders (religious leaders, ethnic leaders, youth leaders, academics), and parents. The need for a high anticipatory attitude to prevent from various potential social conflicts. Therefore, this anticipatory form is carried out by strengthening the role of the three education environment sectors, namely: (1) formal education (in schools and colleges); (2) non-formal education (in the community); and (3) informal education (in the family and environment) to shape national character values such as tolerance, democratic values, and cooperation values in multicultural societies. The formation of national character values informal education can be held through the process of character learning in all subjects and the habituation process in the association of students in schools/colleges. While the formation of the nation's character in non-formal education can be through community activities organized by the community and the government such as workshops (training), upgrading and socialization, where the community activities can provide the understanding and build community awareness to further recognize the importance of values national character value. While the formation of the nation's character in informal education can be through guidance and exemplary parenting and community leaders. The three paths of the educational environment, have an important role to shape the character of the nation so they can build a multicultural life that is peaceful, harmonious, and harmonious.

**Keywords:** habituation, character multicultural, north maluku, mutual cooperation

## PENDAHULUAN

Maluku Utara merupakan salah satu provinsi dengan tingkat keberagaman budaya (*multicultural*) yang tinggi pada masyarakatnya. Hal itu terlihat dari keberagaman bahasa, suku, etnik, dan agama. Namun meskipun beragam, aktifitas kehidupan masyarakat sehari-hari terlihat aman dan damai. Tentu keberagaman dipandang sebagai realitas sosial bagi masyarakat untuk saling mengenal satu sama lain dalam rangka hidup bertoleransi, saling menghargai dan menghormati, serta membangun persaudaraan yang lebih baik tanpa melihat latar belakang identitas sosial yang berbeda-beda baik suku, agama, maupun ras (SARA).

Jika dilihat dari aspek teoritis bahwa keberagaman merupakan suatu kebaikan asalkan adanya sikap terbuka dan saling menerima dari masyarakat terhadap sesuatu yang berbeda, sebagaimana dikatakan (Blum, 2001) “manifestasi penerimaan keragaman budaya sebagai sesuatu kebaikan yang diterima dan dipelihara untuk mengekspresikan nilai”. Namun sebaliknya dapat menjadi ancaman ketika masih terdapatnya masyarakat yang tidak mau menerima keberagaman tersebut, sehingga berujung pada pertentangan, pertikaian bahkan konflik sosial di masyarakat daerah tersebut, sebagaimana dikatakan Rahman (2005) dalam Rifai, (2020) bahwa “konflik-konflik kedaerahan sering terjadi seiring dengan ketiadaan pemahaman akan keberagaman atau multikultur”.

Maluku Utara dilihat dari aspek historis merupakan salah satu daerah di Indonesia yang pernah melewati peristiwa konflik sosial yang panjang yang mengakibatkan kerugian material dan korban yang sangat banyak. Konflik sosial tersebut berkisar tahun 2000-an yang pada awalnya dimulai dari konflik Maluku (Ambon), namun karena lambat penanganannya sehingga semakin membesar dan meluas sampai ke Maluku Utara (Triyono, 2004). Tentu konflik sosial tersebut telah menjadi trauma sosial tersendiri bagi masyarakat untuk tidak ingin kembali ke masa-masa itu. Oleh karena itu, diperlukan sikap antisipasi, bijak, dan motivasi dari para tokoh masyarakat seperti tokoh agama, tokoh etnik, tokoh pendidikan/akademisi, tokoh pemuda, dan termasuk pemerintah sendiri baik pemerintah daerah maupun pemerintah pusat untuk secara bergotong-royong bersama-sama menjaga keharmonisan dan persaudaraan dalam satu ikatan bangsa yakni “Bhinneka Tunggal Ika” (berbeda-beda tapi satu) dalam bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).

Adapun upaya yang harus dibangun secara terus-menerus yaitu penanaman nilai karakter bangsa kepada masyarakat yang disebut pendidikan karakter bangsa. Pendidikan karakter bangsa adalah pendidikan yang mengembangkan nilai-nilai budaya dan karakter bangsa pada diri peserta didik sehingga mereka memiliki nilai dan karakter sebagai karakter dirinya, menerapkan nilai-nilai tersebut dalam kehidupan dirinya sebagai anggota masyarakat dan warganegara yang religius, nasionalis, produktif dan kreatif (Kemendiknas, 2010). Nilai karakter bangsa yang dimaksud diantaranya seperti nilai toleransi, nilai demokratis, dan nilai gotong royong pada masyarakat multikultural. Ketiga nilai tersebut sangat kuat dan penting untuk membentuk masyarakat multikultural, meskipun tidak mengabaikan nilai-nilai karakter bangsa yang lainnya.

Nilai-nilai tersebut harus dipahami dan ditanamkan secara menyeluruh kepada masyarakat multikultural sehingga menjadi modal sosial (*social capital*) untuk menghilangkan sekat-sekat perbedaan dan saling-menghargai satu sama lain sehingga membuat masyarakat saling percaya serta menjauhkan diri dari sikap curiga yang berlebihan karena bisa menjadi sumber pemicu retaknya hubungan baik di masyarakat. Hal tersebut seperti pendapat (Tilaar, 2004) “multikulturalisme menuntut kehidupan bersama yang penuh toleransi, tetapi saling pengertian antar budaya, antar bangsa dalam membina suatu dunia yang baru. Pemahaman tersebut memerlukan dukungan, alasan-alasan, pengakuan, penghargaan, penilaian, penguatan, dan empati dalam kebersamaan hidup”. Dengan demikian, baik nilai toleransi, nilai demokratis, maupun nilai gotong royong harus melekat pada setiap anggota masyarakat multikultural untuk tercapainya integrasi sosial di masyarakat.

Adapun upaya yang dilakukan untuk membentuk nilai karakter bangsa kepada masyarakat melalui proses 3 (tiga) jalur lingkungan pendidikan yaitu: 1) pendidikan formal (di sekolah dan perguruan



tinggi), 2) pendidikan non-formal (di masyarakat), dan 3) pendidikan informal (di keluarga dan lingkungan). Ketiga lingkungan pendidikan tersebut memiliki peran yang sangat strategis dan memiliki tanggung jawab besar untuk membentuk karakter bangsa sehingga terbangun masyarakat yang harmonis, rukun, dan damai dalam kehidupan sehari-hari ditengah masyarakat multikultural seperti Maluku Utara.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

Proses pembentukan nilai-nilai karakter bangsa seperti nilai toleransi, nilai demokratis, dan nilai gotong-royong diperlukan bagi masyarakat multikultural Maluku Utara sebagai upaya preventif untuk menghindarkan masyarakat dari segala bentuk perpecahan dan adu domba yang berujung pada konflik sosial. Dimana dewasa ini permasalahan yang terkait isu suku, agama, dan ras (SARA) masih tetap berlangsung dan tidak pernah ada ujungnya karena makin menguatnya sikap intoleransi dan egoisme sektoral. Proses pembentukan karakter dapat juga dikatakan sebagai upaya untuk memproduksi atau mewariskan nilai-nilai karakter yang baik (*good character*) dari generasi ke generasi di masyarakat. Karakter yang baik adalah keselarasan antara pemahaman, sikap dan tindakan yang baik, sebagaimana menurut pemikiran (Lickona, 2009) bahwa:

“Karakter dikonsepsikan memiliki tiga bagian yang saling berhubungan: pengetahuan moral (*moral knowing*), perasaan moral (*moral feeling*), dan perilaku moral (*moral behavior*). Karakter yang baik terdiri dari mengetahui hal yang baik, menginginkan hal yang baik, dan melakukan hal yang baik – kebiasaan dalam cara berpikir, kebiasaan dalam hati, dan kebiasaan dalam tindakan”.

Membentuk karakter masyarakat yang baik perlu diproduksi oleh setiap generasi karena pada dasarnya proses membentuk bukanlah seperti mesin ATM yang berproses secara otomatis. Namun perlu adanya pemahaman, kesadaran dan keterlibatan langsung oleh seluruh komponen bangsa atau stakeholder diantaranya: pemerintah, tokoh masyarakat (tokoh agama, tokoh etnik, tokoh pemuda, akademisi) beserta orang tua (Unwanullah, 2012). Dimana para stakeholder tersebut memiliki peran dan tanggungjawab besar dalam mendidik serta mengawasi masyarakat (*social control*) dalam menjaga nilai-nilai budaya dan kerukunan hidup demi tercapainya integrasi sosial di masyarakat.

Bagi masyarakat multikultural seperti masyarakat Maluku Utara bahwa kerukunan dan integrasi sosial sangatlah penting untuk dijaga, karena kondisi tersebut akan mengantarkan masyarakat untuk hidup lebih aman dan damai dalam menjalankan aktifitas sehari-hari dalam rangka meningkatkan taraf kehidupannya. Oleh karena itu, pemahaman dan kesadaran dari para stakeholder terutama pemerintah untuk memberikan perlakuan yang adil kepada siapapun sangat menentukan kehidupan masyarakat yang lebih baik lagi. Karena hakikatnya masyarakat yang berkarakteristik multikultural tidak boleh dilepaskan dari unsur keadilan dan kesejahteraan sosial. Ketika unsur tersebut terpenuhi, masyarakat akan merasa memiliki tanggung jawab untuk bersama-sama menjaga karena adanya rasa memiliki satu sama lain, sebaliknya ketika tidak memenuhi unsur tersebut maka kecemburuan sosial akan muncul sehingga gesekan sosial dan pertikaian bisa tidak terelakkan lagi. Hal tersebut sebagaimana pernyataan Soekarno pada tanggal 1 Juni 1945 (Molan, 2015: 119-121) bahwa “kesejahteraan sosial harus menjadi bagian dari konsep masyarakat multikulturalistik. Masyarakat multikulturalistik lebih sulit dibangun dalam kondisi dimana kesejahteraan dan keadilan sosial belum mendapat perhatian. Kesejahteraan sosial sesungguhnya sudah menyelesaikan separuh dari persoalan multikulturalisme dalam sebuah masyarakat, termasuk masyarakat dan bangsa Indonesia”.

Oleh karena itu, upaya pembentukan karakter bangsa menjadi bagian terpenting dalam pembangunan daerah, sebagai bentuk sikap antisipatif terhadap adanya potensi konflik sosial pada masyarakat multikultural. Dalam rangka mencapai hal tersebut, diperlukan peran dari tiga sektor lingkungan pendidikan yaitu pendidikan formal (sekolah), non-formal (masyarakat), dan informal (keluarga dan lingkungan). Ketiga lingkungan pendidikan tersebut, bertanggung jawab secara sadar dan terencana untuk membentuk karakter masyarakat menjadi lebih baik, dilihat dari aspek pola pikir (*mindset*), sikap maupun perilakunya. Karakter tersebut harus didasarkan pada nilai-nilai etika, sebagaimana pendapat

(Elkind & Sweet, 2004), yakni “*character education is the deliberate effort to help people understand, care about, and act upon core ethical values*”, yang dapat dimaknai pendidikan karakter sebagai usaha yang disengaja untuk membantu orang-orang memahami, peduli, dan bertindak atas nilai-nilai etika inti. Dengan kata lain, baik dan buruknya suatu karakter masyarakat sangat bergantung terhadap seberapa besar kualitas dari ketiga lingkungan pendidikan tersebut dalam upaya menyelenggarakan pendidikan karakter bangsa. Lebih jelasnya akan diuraikan sebagai berikut.

## 1. Pendidikan Formal

Pendidikan formal merupakan salah satu jalur pendidikan yang dapat menyelenggarakan pembentukan karakter bangsa kepada masyarakat. Dalam UU Sistem Pendidikan Nasional (Sisdiknas) No. 20 Tahun 2003 Pasal 1 (11) bahwa pendidikan formal adalah jalur pendidikan yang terstruktur dan berjenjang yang terdiri atas pendidikan dasar, pendidikan menengah, dan pendidikan tinggi. Pendidikan formal seyogyanya dapat menanamkan, mewariskan serta mengembangkan nilai-nilai karakter bangsa seperti nilai toleransi, nilai demokratis dan nilai gotong-royong kepada peserta didik melalui proses pembelajaran dan pembiasaan (habituasi). Kedua proses tersebut harus diselenggarakan secara baik dari aspek perencanaan, pelaksanaan, pengawasan maupun evaluasi sehingga diharapkan peserta didik dapat memiliki karakter yang baik di lingkungan sekolah dan di lingkungan masyarakat. Hal tersebut sejalan dengan tujuan pendidikan nasional yang tertuang dalam UU Sisdiknas No. 20 Tahun 2003 Pasal 1 (1) menyebutkan bahwa “pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa dan negara”.

Proses pembelajaran karakter dimulai sejak tingkat sekolah dasar (SD) sampai dengan tingkat perguruan tinggi (Ade, 2012; Suhardi, 2012; Tilaar, 2004). Hal tersebut tidak hanya dibebankan kepada mata pelajaran PPKn dan Agama saja, melainkan pada seluruh mata pelajaran karena pada dasarnya setiap disiplin ilmu memiliki karakteristiknya masing-masing dalam membahas nilai-nilai karakter, sebagaimana pendapat Fraenkel, (1977) bahwa sekolah tidaklah semata-mata tempat dimana guru menyampaikan pengetahuan melalui berbagai mata pelajaran. Sekolah juga adalah lembaga yang mengusahakan usaha dan proses pembelajaran yang berorientasi pada nilai (*value-oriented enterprise*). Proses pembelajaran harus mengarahkan pada pendekatan humanistik, dimana nilai-nilai kemanusiaan seperti budi pekerti dan moral menjadi bagian terpenting dalam proses pembentukan karakter peserta didik, sebagaimana menurut Dewantara, (2013) bahwa “pendidikan adalah daya upaya untuk memajukan bertumbuhnya budi pekerti (kekuatan batin, karakter), pikiran (*intellect*) dan tubuh anak”.

Sedangkan terkait proses pembiasaan (habituasi) dapat dibentuk dan dibudayakan dalam setiap aktifitas belajar peserta didik. Seorang guru/dosen harus mengingatkan dan menekankan kepada peserta didik untuk membangun nilai-nilai karakter bangsa dalam pergaulannya, sebagaimana pendapat (Budimansyah, 2010), bahwa “pembinaan karakter siswa jangan hanya dilakukan didalam kelas ketika pelajaran berlangsung, melainkan harus dilanjutkan di luar kelas melalui kegiatan pembiasaan hidup berkarakter”. Ketika nilai-nilai karakter bangsa seperti nilai toleransi, nilai demokratis, dan nilai gotong-royong dibiasakan maka otomatis akan terbentuk suatu hubungan sosial yang baik antar sesama peserta didik. Bentuk pembiasaan nilai-nilai karakter antara lain seperti, saling menghargai dan menghormati setiap perbedaan, tidak terpolarisasi dan saling membaur tanpa membedakan identitas sosial seperti SARA (suku, agama, dan ras), bersikap terbuka dan menerima saran serta kritikan dari orang lain, saling bekerja sama dalam setiap kegiatan kelompok, saling berkunjung ketika ada temannya yang sakit, bersikap tanggungjawab dan mandiri pada setiap tugas yang diberikan guru, dan lain sebagainya. Sikap dan perilaku pembiasaan demikian sangat positif dalam menciptakan kehidupan yang rukun dan harmonis di lingkungan sekolah serta sebagai bekal bagi mereka kelak hidup di dalam masyarakat, sebagaimana pernyataan (Lickona, 2004), bahwa:

“Pendidikan nilai/karakter di sekolah kini memiliki sebuah pandangan dasar bermakna luas yang mendukung perkembangan pendidikan. Artinya pendidikan karakter sebagai sesuatu yang penting untuk menyelesaikan berbagai permasalahan masyarakat seperti narkoba, obat-obat

terlarang, dan lain-lain, serta membentuk masyarakat yang berkualitas dan taat hukum demi kepentingan sosial”.

Membiasakan peserta didik agar membangun persahabatan dan pergaulan yang luas tanpa membedakan-bedakan identitas sosial di masyarakat dapat mempersatukan mereka di tengah perbedaan. Hal tersebut merupakan suatu proses pembelajaran untuk menemukan karakter pribadi yang baik karena hakikatnya belajar tidak saja sekedar mengetahui, memahami serta melakukan dengan orang lain tetapi juga harus menjadi bagian dari karakter pribadinya sendiri, sebagaimana tujuan pendidikan UNESCO secara umum yaitu bagaimana proses pembelajaran mengarahkan peserta didik untuk mengetahui (*learning to know*), belajar melakukan sesuatu (*learning to do*), belajar menjadi sesuatu (*learning to be*), dan belajar hidup bersama (*learning to live together*).

Sikap pembiasaan tersebut menjadi hal penting karena akan terbawa sampai ke pergaulan di lingkungan rumah dan masyarakat. Hal tersebut merupakan hakekat dari pendidikan karakter itu sendiri seperti dikatakan (Lickona, 2009) bahwa pendidikan karakter, dipahami benar, bertujuan untuk mengembangkan kepribadian. Seluruh siswa lebih baik, masyarakat lebih baik. Pribadi seseorang yang baik di dalam masyarakat sangatlah dibutuhkan, begitupun sebaliknya masyarakat yang baik akan memberikan pengaruh yang baik juga kepada setiap individu di dalam masyarakat tersebut. Namun semuanya itu tentu harus disertai dengan keteladanan dari seorang guru/dosen sebagaimana konsep pendidikan Ki Hajar Dewantara yakni “*Ing Ngarso Sung Tulodo*”, dimana seorang guru/dosen harus bersikap dan berperilaku adil kepada setiap peserta didik dalam setiap aktifitas pembelajaran maupun pergaulannya tanpa melihat latar belakang anak didik tersebut. Dalam bersikap, guru/dosen tidak melihat hanya dari aspek fisik, sosial ekonomi, dan tingkat intelegensi anak kecuali jika itu terkait dengan aspek penilaian (*assessment*) terhadap tugas harian, tes harian, keterampilan, sikap ataupun ujian semester.

Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa pembentukan nilai karakter bangsa tentang nilai toleransi, nilai demokratis, dan nilai gotong-royong pada pendidikan formal seperti sekolah dan perguruan tinggi dapat diselenggarakan melalui proses pembelajaran dan pembiasaan (habitulasi). Proses pembelajaran dapat diselenggarakan melalui berbagai mata pelajaran, terutama mata pelajaran Pendidikan Agama serta Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan (PPKn), sedangkan proses pembiasaan melalui pergaulan sehari-hari peserta didik dengan bersikap terbuka dan tanggung jawab tanpa melihat perbedaan latar belakang atau identitas sosial seperti SARA.

## 2. Pendidikan non-formal

Pembentukan karakter bangsa dapat juga diselenggarakan melalui jalur pendidikan non-formal. Menurut UU Sisdiknas No. 20 Tahun 2003 Pasal 1 (12) menyebutkan bahwa “pendidikan non-formal adalah jalur pendidikan di luar pendidikan formal yang dapat dilaksanakan secara terstruktur dan berjenjang (Indonesia, 2003). Jalur pendidikan tersebut sebagai proses pendidikan karakter yang memang sengaja diprogramkan kepada masyarakat. Proses pembentukan karakter tersebut, diantaranya seperti: mengadakan workshop (pelatihan), penataran dan sosialisasi tentang nilai-nilai karakter bangsa yang diselenggarakan oleh masyarakat dan pemerintah baik pemerintah pusat, pemerintah daerah maupun pemerintah desa. Hal tersebut sangat penting dilakukan kepada masyarakat agar nilai-nilai karakter bangsa seperti nilai toleransi, nilai demokratis, dan nilai gotong-royong dapat terinternalisasi ke dalam diri setiap warga masyarakat sehingga diharapkan dapat membangun kehidupan masyarakat yang lebih rukun dan harmonis, serta dapat menjawab berbagai permasalahan yang muncul di permukaan masyarakat. Menurut Lickona, (2004), salah satu alasan pentingnya pendidikan karakter karena “munculnya konflik di masyarakat disebabkan oleh perbedaan pandangan dasar menyangkut etika. Namun meskipun berbeda dalam cara pandang, tetapi masih adanya pendidikan moral yang dihubungkan dengan masyarakat plural, sehingga kita mampu memposisikan diri agar dapat diterima di dalam masyarakat”.

Adapun nilai toleransi, nilai demokratis, dan nilai gotong-royong yang dapat dikembangkan di masyarakat seperti memiliki pemahaman dan kesadaran untuk menerima keberagaman, adanya kepekaan dan bersahabat dengan orang lain ketika membutuhkan pertolongan, berlaku prinsip kesetaraan dalam sikap dan keputusan politik misalnya dengan melibatkan suku atau agama minoritas dalam struktur organisasi kemasyarakatan sehingga tidak memunculkan kecemburuan sosial dan adanya kesadaran untuk membangun secara bersama-sama, membudayakan musyawarah dalam setiap menyelesaikan masalah, dan lain sebagainya. Kondisi demikian sangat dibutuhkan pada masyarakat multikultural karena dapat membentuk karakter masyarakat yang lebih baik sebagai modal sosial (*social capital*) dalam membangun integrasi dan kerukunan di masyarakat. Hal tersebut selaras dengan pernyataan (Budimansyah, 2010) bahwa:

“Membangun karakter bangsa merupakan suatu proses memberikan posisi warganegara yang lebih mandiri terhadap negara, membina etos demokrasi yang bukan sekedar menekankan hak individual dan supremasi hukum, tetapi terutama menekankan pada pembenahan moral hubungan antar warganegara itu sendiri, penanaman nilai kerukunan yang menghasilkan kepedulian terhadap semua warganegara dan nasib seluruh bangsa”.

Kemandirian masyarakat merupakan salah satu prasyarat yang dimiliki untuk menentukan kualitas hidup masyarakat yang lebih baik. Kehidupan aman, damai dan sejahtera sangat ditentukan oleh kemandirian masyarakat, sehingga perlu mendapat perhatian dan kepedulian yang tinggi dari stakeholder dalam rangka mendukung karakter yang baik di masyarakat. Oleh karena itu, pendidikan karakter menjadi salah satu prioritas dengan harapan komunikasi dan kerja sama antar individu dalam masyarakat dapat terjalin dengan baik. Karena hakekatnya karakter individu yang baik akan dapat menjawab berbagai permasalahan di masyarakat maupun bangsa dan negara, sebagaimana dijelaskan dalam (Kemendiknas, 2010) bahwa “interaksi seseorang dengan orang lain menumbuhkan karakter masyarakat dan karakter bangsa. Oleh karena itu, pengembangan karakter bangsa hanya dapat dilakukan melalui pengembangan karakter individu seseorang”.

Namun demikian, karakter individu di dalam masyarakat harus bersyarat nilai. Dimana setiap individu tidak boleh tercerabut dari nilai-nilai sosial budaya di lingkungan tempat tinggalnya. Dalam konteks hidup berbangsa maka Pancasila wajib dijadikan sebagai nilai hidup di masyarakat karena Pancasila merupakan ideologi bangsa yang berfungsi sebagai kekuatan pemersatu bangsa dan negara. Hal ini sebagaimana dijelaskan dalam (Kemendiknas, 2010) bahwa “karena manusia hidup dalam lingkungan sosial dan budaya tertentu, maka pengembangan karakter individu seseorang hanya dapat dilakukan dalam lingkungan sosial dan budaya yang bersangkutan. Lingkungan sosial dan budaya bangsa adalah Pancasila, jadi pendidikan budaya dan karakter bangsa haruslah berdasarkan nilai-nilai Pancasila”.

Dengan demikian, pembentukan karakter bangsa terkait dengan nilai toleransi, nilai demokratis, dan nilai gotong-royong pada pendidikan non-formal diselenggarakan melalui kegiatan-kegiatan kemasyarakatan yang diselenggarakan oleh pemerintah dan masyarakat itu sendiri. Kegiatan yang dimaksud antara lain workshop (pelatihan), penataran dan sosialisasi mengenai penguatan nilai-nilai karakter bangsa. Kegiatan tersebut dapat memberikan pemahaman dan membangun kesadaran masyarakat untuk mengenal lebih jauh pentingnya nilai karakter bangsa pada masyarakat multikultural.

### **3. Pendidikan Informal**

Selain jalur pendidikan formal dan non-formal, terdapat juga jalur pendidikan informal yang memiliki peranan penting dalam penyelenggaraan pendidikan karakter bangsa kepada masyarakat. Menurut UU RI Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sisdiknas menjelaskan bahwa “pendidikan informal adalah jalur pendidikan keluarga dan lingkungan. Kegiatan pendidikan informal dilakukan oleh keluarga dan lingkungan dalam bentuk kegiatan belajar secara mandiri”. Bentuk pendidikan informal seperti pembinaan dan keteladanan dilakukan oleh setiap orang tua dalam lingkungan keluarga masing-masing dan tokoh masyarakat di lingkungan masyarakat, dimana bentuk kegiatan tersebut diselenggarakan

secara alamiah atau tidak terprogram dan terstruktur seperti pada pendidikan formal dan pendidikan non-formal.

Pembinaan dan keteladanan orang tua di keluarga mengenai nilai toleransi, nilai demokratis, dan nilai gotong-royong perlu dipraktekkan karena keluarga sebagai tonggak dasar pendidikan bagi anak untuk mengenal jati dirinya, sebagaimana menurut (Lickona, 2009) bahwa “keluarga adalah aliran kebaikan pertama, tempat dimana kita belajar tentang kasih, tempat dimana kita belajar tentang komitmen, pengorbanan dan keyakinan dalam sesuatu yang lebih besar daripada diri kita sendiri. Keluarga meletakkan landasan moral yang di atasnya seluruh institusi sosial lainnya dibangun”. Figur pertama yang dapat diteladani oleh anak adalah orang tua, terlebih lagi anak yang berusia belum baligh tentu segala sikap dan perilaku orang tua ataupun orang dewasa disekitarnya dipandang baik oleh anak akibat dari ketidaktahuan dan ketidakpahamannya. Hal ini sebagaimana dikatakan Jean Piaget dalam Winataputra, et al., (2014) bahwa:

“Ada dua tingkat perkembangan moral pada anak usia antara 6-12 tahun yakni *heteronomy* dan *autonomy*. Pada tingkatan *heteronomy* segala aturan oleh anak dipandang sebagai hal yang datang dari luar jadi bersifat eksternal dan dianggap sakral karena aturan itu merupakan hasil pemikiran orang dewasa. Sedangkan pada tingkatan *autonomy* anak mulai menyadari adanya kebebasan untuk tidak sepenuhnya menerima aturan itu sebagai hal yang datang dari luar dirinya”.

Perkembangan moral setiap anak berbeda-beda sehingga orang tua harus memperhatikan secara serius dan cermat mengenai proses perkembangan anak. Jika itu tidak dilakukan maka berakibat buruk terhadap sikap dan perilaku anak itu sendiri ketika berinteraksi dan bergaul baik di dalam keluarganya maupun di lingkungan masyarakat.

Adapun pembinaan dan keteladanan dari orang tua seperti, mendidik anak untuk rajin dan taat beribadah, membudayakan dialog/musyawah dalam setiap penyelesaian masalah keluarga, menghargai setiap pandangan dan sikap anak yang berbeda dengan orang tuanya (selama masih dapat dipertanggungjawabkan), mengajak anak untuk turut serta membantu dan bekerja sama dalam setiap aktifitas di rumah (contoh: membersihkan rumah dan pekarangan), serta mendorong anak bergaul di luar rumah tanpa membedakan latar belakang suku atau agama sehingga dapat berbaur dengan teman-temannya. Sikap dan perilaku demikian dapat menjadi pembiasaan bagi anggota keluarga untuk mempraktekkan nilai-nilai karakter di dalam internal keluarga dan di luar lingkungan keluarga (masyarakat) demi membangun rasa persaudaraan, seperti dikemukakan Sumaatmadja, (2002), di dalam keluarga terjadi proses pendidikan dalam arti proses pendewasaan dari individu yang tidak berdaya kepada calon pribadi yang mengenal pengetahuan dasar, norma, sosial, nilai-nilai dan etika pergaulan. Dengan demikian, keluarga sangat penting dalam mengawal proses perkembangan anak agar memiliki nilai-nilai karakter yang baik (*good character*) dari aspek pengetahuan, sikap dan perilaku di dalam pergaulan sehari-hari.

Kemudian terkait pembentukan karakter bangsa pada lingkungan masyarakat berupa pembinaan nilai-nilai agama dan kebangsaan melalui kegiatan kemasyarakatan, misalnya mengadakan perayaan hari besar nasional dan keagamaan, serta melalui rapat musyawarah desa. Kegiatan kemasyarakatan tersebut diupayakan sebagai wahana untuk menanamkan dan membangun nilai-nilai karakter bangsa seperti nilai toleransi, nilai demokratis, dan nilai gotong-royong dalam bentuk sikap dan perilaku. Hendaknya dalam setiap kegiatan nasional dan keagamaan senantiasa mengundang atau melibatkan berbagai perwakilan tokoh masyarakat (tokoh agama, tokoh etnik, tokoh pemuda) dan termasuk pemerintah setempat. Maksud dan tujuan dilibatkannya perwakilan dari tokoh masyarakat agar senantiasa membangun silaturahmi dan komunikasi yang baik, sekaligus untuk memperkuat kerukunan antar umat beragama dan intern umat beragama. Membangun sikap toleransi, tenggang rasa, tidak bersikap fanatik atau moderat serta saling memahami perbedaan. Kegiatan-kegiatan seperti itu sangat penting untuk dibangun di masyarakat yang berkarakteristik multikultural atau multietnik seperti masyarakat Maluku Utara, sebagaimana pernyataan (Budimansyah, 2010) bahwa “di lingkungan masyarakat diupayakan agar

terjadi proses penguatan dari tokoh-tokoh masyarakat terhadap perilaku mulia yang dikembangkan menjadi kegiatan keseharian di lingkungan masyarakat masing-masing”.

Disamping itu, perlunya keteladanan dari para tokoh masyarakat daerah dimana harus memperlihatkan karakter yang baik sehingga dapat diteladani oleh anggota masyarakat. Tokoh masyarakat harus bisa mempersatukan masyarakatnya dari berbagai perbedaan atau permasalahan, bukan sebaliknya hanya menambah keruh situasi dan kondisi di lingkungan masyarakat. Hal tersebut sangat berbahaya bagi masyarakat yang berkarakteristik patronase dimana sikap dan perilaku anggota masyarakat sangat dipengaruhi oleh tokoh masyarakatnya.

## KESIMPULAN

Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa pembentukan nilai-nilai karakter bangsa seperti nilai toleransi, nilai demokratis, dan nilai gotong royong pada pendidikan informal diselenggarakan melalui pembinaan dan keteladanan dari orang tua dan tokoh masyarakat. Pembinaan dan keteladanan dari orang tua seperti, mendidik anak untuk rajin dan taat dalam beribadah, menghargai setiap pandangan dan sikap yang berbeda di lingkungan keluarga (selama masih dapat dipertanggungjawabkan), membudayakan dialog/musyawah dalam setiap penyelesaian masalah di keluarga, mengajak anak untuk saling bekerja sama dalam setiap aktivitas bersama di rumah, serta mendorong anak untuk bergaul dan berbaur bersama teman-temannya meski latar belakang sosial yang berbeda-beda. Sedangkan pembinaan dan keteladanan dari tokoh masyarakat diselenggarakan melalui kegiatan kemasyarakatan seperti perayaan hari besar nasional, hari besar setiap agama, dan rapat-rapat di organisasi kemasyarakatan, dan lain sebagainya. Dimana semua kegiatan tersebut dijadikan sebagai wahana dalam menanamkan dan membangun nilai-nilai karakter bangsa.

## DAFTAR PUSTAKA

- Ade, H. (2012). Potensi Pembelajaran Berpola Pemberdayaan Berpikir Melalui Pertanyaan (PMBP) Dipadu Think Pair Share (TPS) Dalam Upaya Memberdayakan Keterampilan Metakognisi Siswa Multietnis Di SD Kota Ternate. *Bionature*, 13(1).
- Blum, L. A. (2001). Antirasisme, Multikulturalisme, dan Komunitas antar Ras: Tiga Nilai yang Bersifat Mendidik bagi Sebuah Masyarakat Multikultural. In May, S. Collins-Chobanian & K. Wong [eds]. *Etika Terapan I: Sebuah Pendekatan Multikultural*. Yogyakarta: PT Tiara Wacana Yogya, Terjemahan, hlm.
- Budimansyah, D. (2010). *Penguatan Pendidikan Kewarganegaraan Untuk Membangun Karakter Bangsa*. Jakarta: Widya Aksara Press.
- Dewantara, K. H. (2013). *Ki Hadjar Dewantara: I, Pendidikan Pemikiran, Konsepsi, Keteladanan, Sikap Merdeka*. Yogyakarta: Majelis Luhur Persatuan Tamansiswa.
- Elkind, D. H., & Sweet, F. (2004). You are a Character Educator. *Today's School*, 5(2), 16–22.
- Fraenkel, J. R. (1977). *How to Teach about Values: An analytic approach*. USA: Prentice-Hall.
- Indonesia, P. R. (2003). Undang-Undang Republik Indonesia nomor 20 tahun 2003 tentang sistem pendidikan nasional. *Pemerintah Republik Indonesia*. Jakarta: Kementerian Dalam Negeri RI.
- Kemendiknas. (2010). *Pengembangan Pendidikan Budaya dan Karakter Bangsa*. Jakarta: Badan Penelitian dan Pengembangan Pusat Kurikulum.
- Lickona, T. (2004). *Character Matters: How to help our children develop good judgment, integrity, and other essential virtues*. Simon and Schuster.
- Lickona, T. (2009). *Educating for Character: How our schools can teach respect and responsibility*. Bantam.
- Rifai, A. (2020). Perpustakaan dan Pendidikan Multikulturalisme. *Media Pustakawan*, 14(2), 62–68.
- Suhardi, D. (2012). Peran SMP berbasis Pesantren sebagai Upaya Penanaman Pendidikan Karakter Kepada Generasi Bangsa. *Jurnal Pendidikan Karakter*, (3).
- Sumaatmadja, N. (2002). *Pendidikan Pemanusiaan Manusia Manusiawi*. Jakarta: Alfabeta.
- Tilaar, H. A. R. (2004). *Multikulturalisme: Tantangan-Tantangan Global Masa Depan dalam Transformasi Pendidikan Nasional*. Jakarta: Grasindo.





Trijono, L. (2004). *Potret Retak Nusantara: Studi kasus konflik di Indonesia*. Jakarta: CSPS Books.

Unwanullah, A. (2012). Tranformasi Pendidikan untuk Mengatasi Konflik Masyarakat dalam Perspektif Multikultural. *Jurnal Pembangunan Pendidikan: Fondasi Dan Aplikasi*, 1(1).

Winataputra, U. S., Delfi, R., Pannen, P., & Mustafa, D. (2014). Hakikat Belajar dan Pembelajaran. In *Hakikat Belajar dan Pembelajaran*. Jakarta.